



## Moderasi Pemikiran Keagamaan di Indonesia:

### Sejarah, Konteks, dan Peran Muhammadiyah

Oleh BIYANTO

Guru Besar UIN Sunan Ampel, Anggota BPH Universitas Muhammadiyah Gresik,

Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur

Secara terminologi moderasi berarti jalan tengah (*middle path*), sesuatu yang ada di tengah dari dua sifat buruk. Dapat dicontohkan, sifat berani dipandang baik karena berada diantara karakter ceroboh dan takut. Demikian juga sifat dermawan merupakan akhlak terpuji karena berada diantara karakter boros dan kikir. Dalam konteks praktik keagamaan, moderasi bermakna pemikiran, sikap, dan perilaku beragama dengan cara mengambil posisi pertengahan (*wasathiyah*).<sup>1</sup> Moderasi beragama dapat menjadikan pemeluknya terhindar dari sikap ekstrem dan berlebih-lebihan dalam menjalankan ajaran agama. Al-Qur'an secara tegas melarang sikap berlebih-lebihan atau ekstrem dalam beragama (*ghuluw*).<sup>2</sup> Nabi Muhammad Saw juga bersabda: "Jauhkanlah diri kalian dari *ghuluw* dalam beragama, karena sesungguhnya sikap *ghuluw* ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian."<sup>3</sup> Berdasarkan landasan teologis-normatif inilah moderasi atau *wasathiyah* Islam penting dikedepankan dalam kehidupan keagamaan di Indonesia.

Seiring dengan tantangan keagamaan era kontemporer moderasi beragama juga dapat menjadi alternatif untuk mengkonter radikalisme atau ekstremisme. Dalam konteks kajian Islam, konsep moderasi beragama banyak dikaitkan dengan *wasathiyah Islam*. Hashim Kamali menyebut konsep *wasathiyah* dalam al-Qur'an sebagai spirit moderasi dalam beragama, baik berkaitan dengan pemikiran, sikap, dan perbuatan.<sup>4</sup> *Wasathiyah* Islam lazim digunakan di negara-negara minoritas Muslim untuk menyebut posisi pertengahan diantara dua ekstremitas. Penguatan wacana moderasi beragama juga dapat dijumpai dalam sejumlah karya ilmiah, seperti

<sup>1</sup>Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, 2019), 2.

<sup>2</sup>Al-Qur'an, *Al-Nisa'* (4): 171 dan *al-Ma'idah* (5): 77.

<sup>3</sup>Teks hadith Nabi di atas adalah: *الدِّينُ فِي الْغُلُوِّ قَبْلَكُمْ كَانَ مَنْ كَأَهْلٍ فَإِنَّمَا الدِّينُ، فِي وَالْغُلُوِّ إِيَّاكُمْ*. [HR. Ahmad (I/215, 347), al-Nasa'i (V/268), Ibnu Majah (Nomor 3029), Ibnu Khu-zaimah (Nomor 2867) dan lainnya, dari Sahabat Ibnu 'Abbas].

<sup>4</sup>Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasathiyah* (USA: Oxford University Press, 2015), 49 dan 203.



Angel Rabasa,<sup>5</sup> Paul Sutliff,<sup>6</sup> dan Rosemary Corbett.<sup>7</sup> Beberapa karya ini menekankan pentingnya moderasi beragama di tengah menguatnya radikalisme bernuansa keagamaan.

Dalam pertemuan tingkat tinggi yang diikuti ulama dan sarjana Muslim dari berbagai dunia di Bogor pada 1-3 Mei 2018 juga ditekankan pentingnya Wasathiyah Islam. Wasathiyah dipandang sebagai strategi jitu untuk melawan radikalisme dan mewujudkan peradaban global.<sup>8</sup> Wacana moderasi beragama semakin menguat seiring dengan adanya kritik pada program deradikalisasi yang dijalankan pemerintah untuk mengkonter radikalisme dan terorisme. Deradikalisasi dipahami sebagai usaha untuk mengubah ideologi, pemikiran, pemahaman, sikap, dan tindakan seseorang yang semula radikal menjadi tidak radikal. Strategi yang dilakukan adalah melalui reedukasi, resosialisasi, dan penanaman nilai-nilai multikulturalisme. Meski secara konseptual sangat baik, namun harus diakui bahwa dalam banyak kasus penanganan radikalisme dan terorisme di Tanah Air aparat keamanan masih menggunakan pendekatan kekuasaan dan kekerasan.

Ironinya Tindakan kekerasan terhadap terduga teroris sering dilakukan aparat keamanan di depan keluarganya. Perlakuan ini pasti menghadirkan trauma mendalam, bahkan sangat mungkin dendam kesumat dari keluarga terduga teroris. Pada konteks itulah pendekatan moderasi beragama penting dijadikan gerakan semua kalangan. Harapannya agar penanggulangan terorisme tidak kontra produktif, bahkan melahirkan radikalisme baru.<sup>9</sup> Apalagi sejauh ini program deradikalisasi juga belum menyelesaikan problem radikalisme secara mendasar dan komprehensif. Karena itulah pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah memasukkan kebijakan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024).<sup>10</sup> Program moderasi beragama merupakan warisan yang sangat berharga dari Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama RI (2014-2019).

Melalui berbagai media Muhammadiyah juga menekankan pentingnya moderasi beragama sebagai manifestasi pengamalan ajaran Islam yang fundamental. Bahkan sejak awal

<sup>5</sup>Angel Rabasa, et.al, *Building Moderate Muslim Networks* (Santa Monica, Arlington, Pittsburgh: RAND Cooperation, 2007).

<sup>6</sup>Paul Sutliff, *Civilization Jihad and the Myth of Moderate Islam* (ISBN-13: 978-1502890931, 2015).

<sup>7</sup>Rosemary R. Robert, *Making Moderate Islam* (Stanford, California: Stanford University Press, 2017).

<sup>8</sup>Office of Special Envoy of the President of the Republic of Indonesia for Interfaith and Intercivilization Dialogue and Cooperation, "Wasathiyah Islam: For Global Civilization: Conception and Implementation" (Bogor, Indonesia, 1-3 Mei 2018).

<sup>9</sup>Haedar Nashir, "Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan: Perspektif Sosiologi", disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Gurubesar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (12 Desember 2019), 70.

<sup>10</sup>Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, 2019).



Muhammadiyah menunjukkan sikap tidak setuju terhadap program deradikalisasi yang dijalankan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).<sup>11</sup> Haedar Nashir dalam sejumlah tulisan juga mengingatkan karakter Muhammadiyah sebagai organisasi “moderat-berkemajuan”<sup>12</sup> dan “modernis-moderat”.<sup>13</sup> Dengan karakter demikian, Haedar Nashir seolah ingin mengajak Muhammadiyah menjadi pelopor gerakan moderasi dalam beragama. Jika Muhammadiyah sukses menjadi pelopor gerakan moderasi, maka kehadiran organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan ini akan senantiasa dirindukan umat dan bangsa. Hal itu karena Muhammadiyah dapat memberikan jalan keluar dalam penanganan ekstremisme dalam kehidupan keagamaan melalui pendekatan moderasi. Pendekatan moderasi juga dirasa jauh lebih manusiawi karena tidak menjadikan seseorang terstigma radikal.

### **Moderasi Beragama: Sejarah dan Karakternya**

Diantara ulama yang memberikan perhatian pada persoalan moderasi beragama adalah Syaikhul Islam Ibn Taimiyah (1236-1328). Melalui karya berjudul: *Al-‘Aqidah Al-Wasithiyah (The Creed of Al-Wasithiyah)*, Ibn Taimiyah menggambarkan aqidah atau teologi tengahan (*al-wasathiyah*) sebagai paham yang dianut kelompok Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah. Ibn Taimiyah mengartikan *al-Sunnah* dengan *al-thariqah*, yakni jalan yang dianut Rasulullah Saw, sahabat, dan orang-orang mengikuti jejaknya hingga hari kiamat. Sementara *al-Jama‘ah* berarti sejumlah orang yang mengelompok, yakni kaum salaf (pendahulu) dari kalangan sahabat dan orang-orang yang mengikuti kebaikan mereka. Menurut Ibn Taimiyah, kelompok Ahl al-Sunnah memiliki sifat *al-Najiyah* (yang selamat) dan *al-Manshurah* (yang memperoleh pertolongan).<sup>14</sup>

Terkait dengan pandangan Ibn Taimiyah tentang aqidah *wasathiyah*, Syafiq Mughni menyatakan bahwa teologi tengahan merupakan posisi diantara dua ekstrem: *tamtsil* (memisalkan sifat Tuhan dengan sifat manusia) yang dianut kaum Musyabbihah dan *ta’thil* (meniadakan sifat-sifat Tuhan) yang dianut kelompok Jahmiyah. Posisi moderasi juga tampak dalam pandangan mengenai perbuatan manusia, misalnya antara Jabariyah dan Qadariyah serta Murji’ah dan Mu’tazilah. Posisi *wasathiyah* juga dapat dilihat tatkala kaum Sunni menilai posisi para sahabat yang terlibat dalam perang saudara. Bahkan *wasathiyah* telah menjadikan karakter

<sup>11</sup>Anonim, “Moderasi Beragama dalam Perspektif Muhammadiyah,” *Muhammadiyah.or.id* (Diakses pada 25 November 2020).

<sup>12</sup>Haedar Nashir, “Memilih Moderat Berkemajuan,” *Republika* (28 November 2020), 1-7.

<sup>13</sup>Haedar Nashir, “Muhammadiyah Modernis-Moderat,” *Jawa Pos* (18 November 2020), 1-7.

<sup>14</sup>Sa’id bin ‘Ali bin Wahfi al-Qahthaniy, *Syarh al-‘Aqidah al-Wasithiyah*, 17.



ajaran Islam sebagai agama yang moderat dibanding agama lain di dunia.<sup>15</sup> Tampak sekali bahwa *wasathiyah* Islam yang dipromosikan Ibn Taimiyah sangat relevan di tengah kondisi kehidupan keberagamaan yang diwarnai polarisasi bercorak binaris: *inside-outside*, *ingroup-outgroup*, kami-kamu (*minna-minkum*), dan benar-salah. Dampaknya, masing-masing kelompok cenderung melakukan klaim kebenaran (*truth claim*).

Meski wacana moderasi beragama terus menguat dan dipandang sebagai alternatif menangani persoalan radikalisme bernuansa keagamaan, namun istilah moderasi juga banyak mendapat kritik. Terma moderasi dinilai terlalu reduksionis sehingga mengalami penyempitan makna. Karena itu, menurut para pengkritik istilah moderasi dipandang tidak cukup mewakili konsep *Wasathiyah* Islam. Sebagian ahli mengajukan alternatif dengan istilah *religious truism*, *religious proporsionalism*, dan *religious middlelism*. Sejumlah istilah ini substansinya adalah jalan tengah. Secara populer jalan tengah itu disebut moderasi. Mengenai karakter moderasi beragama diantaranya dapat dirujuk pada hasil Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada 2015. Disebutkan ada 12 prinsip Wasatiyyah Islam, yakni; tengahan (*tawassut*), seimbang (*tawazun*), adil (*i'tidal*), toleran (*tasamuh*), persamaan (*musawa*), musyawarah (*syura*), pembaruan (*ishlah*), berpikir prioritas (*aulawiyyah*), dinamis dan inovatif (*tathawwur wa ibtikar*), berkeadaban (*tahadhdhur*), mencintai Tanah Air (*wathaniyyah wa muwathanah*), dan menjadi pelopor (*qudwatiyyah*).<sup>16</sup>

Sementara hasil pertemuan ulama dan sarjana Muslim level dunia di Bogor menghasilkan karakter *wasathiyah* Islam yang lebih ringkas. Pertemuan ini diinisiasi oleh Din Syamsuddin dalam kapasitas sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama antar Agama dan Peradaban. Turut hadir dalam pertemuan penting itu Syaikh al-Azhar, Ahmad Muhammad Ahmad al-Thayyib. Pertemuan ulama dan sarjana level dunia itu menghasilkan “Bogor Message”, yang menjabarkan konsep *wasathiyah* Islam dengan tujuh karakter utama, yakni; *tawazun* (memosisikan di jalur tengah dan lurus), *i'tidal* (berperilaku proporsional dan adil dengan tanggung jawab), *tasamuh* (mengakui dan menghargai perbedaan dalam semua aspek kehidupan), *syura* (menyelesaikan masalah melalui musyawarah untuk mencapai konsensus), *ishlah* (terlibat dalam tindakan reformatif dan konstruktif untuk kebaikan bersama), *qudwah* (berinisiatif mulia dan memimpin untuk kesejahteraan manusia), dan *muwathanah* (mengakui

<sup>15</sup>Syafiq A Mughni, *Makna di Balik Peristiwa* (Surabaya: Hikmah Press, 2020), 141.

<sup>16</sup>Bogor Message in High level Consultation of World Muslim Scholars on Wasatiyyat Islam, Bogor, West Java, Indonesia (May, 1-3, 2018), 1-2.



negara bangsa dan menghormati kewarganegaraan).<sup>17</sup> Penting disadari, jika seseorang atau kelompok mempraktikkan nilai-nilai moderasi dalam beragama, maka pada saatnya akan terwujud umat pertengahan (*ummatan wasathan, middle people*).

Berpikiran, bersikap, dan berperilaku moderat dalam beragama sangat dibutuhkan karena seringkali terjadi insiden radikalisme bernuansa keagamaan. Ekspresi radikalisme itu diwujudkan dalam bentuk kekerasan pada orang-orang yang tidak sepaham dengan diri dan kelompoknya. Kelompok radikal dengan karakter negatif juga selalu berpikiran: *He who is not with me is against me* (Orang yang tidak mengikuti saya adalah musuh saya).<sup>18</sup> Pandangan ini tentu sangat berbahaya karena dapat menghadirkan teror bagi orang lain. Dampaknya, mereka yang terteror mengalami ketakutan dan kengerian yang luar biasa. Dimensi negatif dari radikalisme pada saatnya melahirkan “khawarij gaya baru/neo-khawarij” yang memandang enteng penderitaan, bahkan kematian orang lain. Sebagai fenomena sosial keagamaan, radikalisme juga mewujudkan dalam banyak bentuk. Bahkan radikalisme telah bersinggungan dengan gerakan-gerakan salafisme. Pada konteks ini, Amien Abdullah memetakan gerakan salafisme dalam tiga kategori penting, yakni Salafi Dakwah, Salafi Gerakan, dan Salafi Jihadi.<sup>19</sup> Salafi Jihadi inilah yang menjadi basis ideologi gerakan radikalisme.

Diantara doktrin penting gerakan berideologi Salafi Jihadi adalah *al-wala' wa al-barra'* (kesetiaan dan penolakan). Dalam kehidupan kemasyarakatan, doktrin ini pasti menimbulkan disharmoni sosial, perpecahan, sektarianisme (*ta'ifiyyah*), parochalisme (*mazhabiyyah*), dan primordialisme (*hizbiyyah*). Dengan karakter demikian, kelompok radikal lebih mencerminkan sebagai organisasi garis keras, baik dalam pemikiran, perasaan, dan perilaku. Yusuf al-Qardhawi menggolongkan kelompok-kelompok radikal sebagai “Dhahiriyyah Baru” dengan enam karakter, yakni; pemahaman agama yang literal, keras dan menyulitkan, sombong terhadap pendapat mereka, tidak menerima perbedaan pendapat, mengkafirkan orang di luar kelompoknya, dan tidak peduli pada fitnah.<sup>20</sup> Karakter ini pasti tidak cocok dengan alam kehidupan yang pluralistik. Padahal jika pluralitas itu dipahami secara positif, maka akan melahirkan pandangan keagamaan yang terbuka (*outward looking, open-minded*) dan toleran. Pemahaman keagamaan yang

<sup>17</sup>Ibid, 10.

<sup>18</sup>Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah* (Bandung: Mizan, 2009), 183.

<sup>19</sup>M. Amien Abdullah, “Ummatan Wasathan untuk Indonesia Berkemajuan,” makalah disampaikan dalam Kajian Ramadan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di Dome Universitas Muhammadiyah Malang pada 27 Juni 2015.

<sup>20</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 49-55.



demikian akan menumbuhkan komitmen yang tulus untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan lintas budaya, etnis, agama, paham keagamaan. Dalam menghadapi tantangan keagamaan era kontemporer saat ini jelas sekali dibutuhkan pemeluk agama yang moderat, inklusif, dan pluralis.

Dalam perspektif ajaran Islam ditegaskan bahwa kemajemukan merupakan bagian dari ketetapan Allah.<sup>21</sup> Secara metaforik al-Qur'an mengilustrasikan jika Allah menghendaki, maka seluruh manusia akan dijadikan satu umat saja. Tetapi, hal itu tidak dilakukan karena Allah ingin menguji sekaligus memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik di muka bumi (*fastabiq al-khairat*).<sup>22</sup> Dengan bersandar pada firman Allah, seharusnya kita berusaha untuk menunjukkan diri sebagai umat yang terbaik (*khairu ummah*).<sup>23</sup> Diantara kategori umat terbaik adalah mereka yang memiliki komitmen kuat untuk menjunjung nilai-nilai kemanusiaan tanpa membedakan latar belakang sosialnya. Beberapa insiden radikalisme bernuansa perbedaan etnik, budaya, agama, dan paham keagamaan menunjukkan betapa kita sebagai bangsa yang dikenal toleran dan beradab, ternyata belum menyiapkan diri dengan baik untuk hidup bersatu dalam perbedaan. Nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang terangkum dalam bahasa Sansekerta; "Bhinneka Tunggal Ika", dalam implementasinya masih jauh dari harapan. Abdul Mukti Ali menganjurkan masing-masing umat berkomitmen untuk mewujudkan budaya *agree in disagreement*.<sup>24</sup> Pandangan Mukti Ali, mengharuskan setiap pemeluk agama dan penganut paham keagamaan berdamai dengan keragaman.

Tetapi penting diingat, konsep moderasi beragama tidak muncul dari ruang hampa, melainkan ada konteks yang melatarbelakangi. Moderasi sengaja dihadirkan untuk menjadi alternatif dalam penanganan persoalan ekstremisme yang terjadi di dunia, termasuk Tanah Air. Pemerintah Indonesia pada awalnya memilih pendekatan *Empowering the Moderates* untuk melakukan kontraterorisme. Sementara Pakistan menggunakan terminologi *Enlightening the Moderates*. Meski menggunakan terminologi berbeda, namun dua negara ini menekankan pentingnya jalan moderasi. Tetapi karena program ini dirasa mengalami kegagalan, dunia Barat mengajukan program *Countering Violent Extremism*. Sedang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memilih diksi *Prevention of Violent Extremism*. Sebelumnya, Malaysia juga membentuk gerakan *Movement of the Moderates*. Dengan mempertimbangkan dinamika yang ada, termasuk insiden radikalisme yang terus terjadi di sejumlah daerah, pemerintah melalui BNPT memilih program

<sup>21</sup> Al-Qur'an, *al-Hujurat* (49): 13.

<sup>22</sup> Al-Qur'an, *al-Maidah* (5): 48.

<sup>23</sup> Al-Qur'an, *Ali 'Imran* (3): 110.

<sup>24</sup> A. Mukti Ali, "Ilmu Perbandingan Agama: Dialog, Dakwah, dan Misi," dalam Burhanuddin Daya dan Herman Leonard Beck (Eds), *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda* (Jakarta: INIS, 1992), 226-229.



deradikalisasi. Dalam perkembangannya, kiritik terhadap program deradikalisasi nyaring disuarakan berbagai kelompok *civil society*. Harapannya, ada perubahan pendekatan penanganan radikalisme dari deradikalisasi ke moderasi.

Meski wacana moderasi terus menguat, tetapi John L Esposito mengingatkan bahwa kata moderasi sejatinya masih mengundang perdebatan. Pernyataan Esposito beralasan karena pengertian moderasi sangat bergantung pada orang-perorang dan dalam konteks apa kata itu digunakan. Untuk memudahkan pengertian moderasi, Esposito menyamakan Muslim moderat dengan Muslim progresif atau Muslim liberal. Sebaliknya, Muslim moderat dibedakan dari Muslim konservatif, tradisional, dan fundamentalis.<sup>25</sup> Mengenai karakter Muslim moderat, Esposito menyatakan; “*Minimally, I would argue that moderate Muslims are those who live and work within society, seek change from below, and reject religious extremism, illegitimate violence, and terrorism. And as in other faiths, in Islam such moderates constitute the majority of the mainstream*” (Minimal, saya berpendapat bahwa Muslim moderat adalah mereka yang hidup dan bekerja dalam masyarakat, mencari perubahan dari bawah, dan menolak ekstremisme agama, kekerasan tidak sah, dan terorisme. Dan sebagai kepercayaan lain, dalam Islam kaum moderat seperti itu merupakan mayoritas atau arus utama).<sup>26</sup>

Sejauh ini persepsi Barat terhadap Islam selalu menjadi rujukan memaknai radikal dalam konteks kekerasan. Dunia Barat pun memahami Islam dengan gambaran-gambaran yang menakutkan sehingga memunculkan gejala *Islamophobia*. Insiden revolusi Iran pada 1979, kebangkitan radikalisme Islam di Afrika hingga Asia Tenggara semakin menambah kesan bahwa Islam merupakan agama yang membenarkan jalan kekerasan. Di dunia akademik, kajian tentang Islam juga tercurah pada tema radikalisme, sebagaimana tergambar melalui karya dengan judul-judul yang menakutkan seperti; Islam Radikal (*Radical Islam*), Islam Militan (*Militant Islam*), dan Jihad (*Sacred Rage*).<sup>27</sup> Kajian-kajian itu muncul karena sebagian kecil dari umat ada yang berpikiran eksklusif. Mereka telah menampilkan wajah Islam yang penuh amarah, bukan Islam yang ramah.

Mereka juga merespon perkembangan modernisasi dunia secara negatif. Sebagian mereka mengatakan, “*Those who think of reforming or modernizing Islam are misguided, and their efforts are bound to fail. Why should it be modernized, when it is already perfect and pure,*

<sup>25</sup>John L. Esposito, *What Everyone Needs to Know About Islam: Answers to Frequently Asked Questions from One of America's Leading Experts* (New York: Oxford University Press, 2011), 147.

<sup>26</sup>Ibid, 148.

<sup>27</sup>Charles Kurzman, “Introduction: Liberal Islam and Its Islamic Context,” dalam Charles Kurzman (Ed), *Liberal Islam: A Sourcebook* (New York: Oxford University Press, 1998), 4.



*universal, and for all time*” (Orang yang berpikir tentang reformasi atau modernisasi Islam adalah salah jalan, dan usaha-usaha mereka pasti gagal. Mengapa Islam harus dimodernisasi, kalau Islam itu sendiri sudah sempurna dan murni, universal, dan berlaku untuk semua zaman).<sup>28</sup> Pernyataan itu dapat dimaknai adanya penolakan terhadap usaha-usaha untuk memodernisasi pemahaman terhadap ajaran Islam. Dampaknya, terjadi pola pikir yang eksklusif dan gagap merespon modernisasi.

Dalam waktu bersamaan juga terjadi sejumlah insiden kekerasan dan perilaku militan yang ditunjukkan sebagian umat. Apalagi sejak terjadi kasus terorisme yang menyita perhatian dunia, yakni serangan terhadap gedung *World Trade Center* (WTC) dan Pentagon pada 11 September 2001.<sup>29</sup> Menurut sejumlah sumber penyerangan terhadap dua tempat yang sejak lama menjadi simbol keamanan Amerika Serikat itu dilakukan oleh Osamah bin Laden, jaringan al-Qaeda, dan para pelaku bom bunuh diri (*suicide bombers*). Sejak peristiwa yang mengerikan itulah media Barat intensif mengintrodusir istilah radikalisme (*radicalism*), ekstremisme keagamaan (*religious extremism*), dan terorisme (*terrorism*).<sup>30</sup> Setelah peristiwa 11 September, negeri tercinta juga dinodai berbagai insiden terorisme mulai bom Bali I (12 Oktober 2002), bom mobil yang menghancurkan hotel J. W. Marriot (5 Agustus 2003), bom Bali 2 (1 Oktober 2005), dan bom di kantor Kedutaan Besar Australia (9 September 2004). Serangkaian insiden radikalisme dalam berbagai ekspresi dan modus terus terjadi di sejumlah daerah hingga akhir-akhir ini.

### **Konteks Islam Indonesia**

Harus diakui, wajah dan *wijah* (pandangan atau orientasi ideologi keagamaan) umat Islam Indonesia telah banyak diwarnai perdebatan pemikiran kelompok Islam fundamental dan Islam liberal. Fenomena ini bukan sesuatu yang baru dalam tradisi pemikiran keislaman. Seperti dikemukakan Charles Kurzman, pergumulan kelompok Islam fundamental dan Islam liberal terjadi sejak 1970-an.<sup>31</sup> Pandangan Kurzman terasa tepat karena pada masa itu terjadi dinamika pemikiran keagamaan yang dipelopori sejumlah aktivis pergerakan Islam. Pada saat itu, Nurcholish Madjid (Cak Nur), tokoh sentral pembaruan pemikiran Islam, telah terlibat dalam perdebatan sengit dengan kelompok Islam fundamental. Melalui berbagai tulisannya, Cak Nur

<sup>28</sup>Bassam Tibi, *Islam and the Cultural Accomodation of Social Change* (Boulder, Colo: Westview, 1990), 73.

<sup>29</sup>Ibrahim M. Abu Rabi', *A Post-September 11 Critical Assessment of Modern Islamic History* (Oxford: Oneworld Publications, 2002).

<sup>30</sup>John L. Esposito, *What Everyone*, 63.

<sup>31</sup>Charles Kurzman (Ed), *Liberal Islam*, 7.





menggelorakan wacana sekularisasi, Islam yes, partai Islam no, kebebasan berpikir, ide tentang kemajuan, dan pentingnya sikap terbuka (inklusivisme). Bahkan wacana Islam yes, partai Islam no, telah membuat hubungan Cak Nur dengan elit partai Islam memanas. Mereka protes keras dengan gagasan Cak Nur yang dianggap mengabaikan perjuangan tokoh-tokoh Islam melalui partai politik.

Kontribusi Cak Nur yang luar biasa dalam pemikiran keislaman secara tidak langsung telah memosisikannya sebagai Bapak sekaligus Ideolog Islam Liberal. Meski tidak pernah menggunakan istilah Islam liberal dalam seluruh karyanya, namun Cak Nur layak menjadi rujukan kelompok Islam liberal. Apalagi gagasan Cak Nur banyak dirujuk kelompok Muslim liberal. Sementara kelompok Islam fundamental melalui beberapa tokohnya juga tidak mau kalah. Mereka terus mengampanyekan penolakan terhadap gagasan yang dikembangkan Muslim liberal. Sepanjang era reformasi, kelompok Islam fundamental juga menunjukkan minat yang luar biasa untuk memasuki dunia politik. Bahkan dapat dikatakan kelompok Islam fundamental telah mengalami peningkatan "syahwat politik." Kondisi tersebut relevan dengan hipotesis William Liddle, seorang Indonesianis asal Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa semakin demokratis sebuah negara, semakin besar kemungkinan munculnya gerakan fundamental. Sebaliknya, semakin otoriter suatu negara, semakin kecil pula kemungkinan munculnya kelompok fundamental.

Euforia reformasi yang ditandai dengan era kebebasan berorganisasi dan berpendapat menjadikan kelompok-kelompok fundamental bermunculan. Kelompok radikal berideologi kiri juga tumbuh pesat. Kelompok ini semakin berani menampilkan identitas dan simbol-simbol organisasi yang dilarang sepanjang era orde baru. Era reformasi juga berdampak pada munculnya dialektika pemikiran keislaman antara Muslim fundamental dan liberal. Kondisi ini menyebabkan terjadinya persaingan dan perebutan pengaruh diantara dua kelompok tersebut. Agar dialektika pemikiran kelompok Islam fundamental dan Islam liberal secara diametral tidak saling berhadapan, maka penting dirumuskan jalan tengah pemikiran Islam. Langkah ini penting untuk memoderasi pemikiran Islam. Masing-masing aliran atau orientasi pemikiran keagamaan (*school of religious thought*) harus diajak untuk bergerak ke posisi tengah (*median position*). Kehadiran kelompok tengah penting untuk menampilkan wajah Islam yang maju, terbuka, toleran, ramah, dan sesuai dengan suasana modernitas. Pada konteks itulah organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah harus memainkan peran penting dalam mewujudkan wajah Islam moderat.



Ikhtiar memoderasi pemikiran keagamaan penting karena masing-masing kelompok sejatinya memiliki kelemahan mendasar. Kelompok Islam fundamentalis dengan dalih ingin mengembalikan amalan keagamaan sebagaimana dicontohkan generasi awal Islam telah mengalami distorsi yang luar biasa. Dampaknya, kelompok fundamental ini kerap kali menampilkan wajah Islam masa lalu, kuno, anti pembaruan, dan cenderung romantisme sejarah. Islam fundamental juga tidak segan menempuh jalan radikal dan reaksioner untuk mencapai tujuan. Perspektif ini jelas tidak kondusif jika dihadapkan pada persoalan keislaman era kontemporer. Tampak sekali ada kesan, kelompok Islam fundamental gagap menghadapi tantangan modernitas. Sebaliknya, kelompok Islam liberal yang mengusung tema reaktualisasi ajaran juga sering memicu kontroversi. Kelompok Islam liberal dikatakan telah mengotak-atik ajaran yang dianggap mapan oleh umat. Dengan meminjam istilah Kuntowijoyo, kelompok Islam liberal tampak mengalami gejala "sawan kekanak-kanakan." Fenomena kekanak-kanakan berarti cara pandang yang "sok liberal", "kekiri-kirian", dan "sok radikal."<sup>32</sup> Jika mengamati pemikiran yang diwacanakan kelompok liberal sejatinya juga tampak kurang mendalam, parsial, dan cenderung melompat (*jumping*), sehingga terputus dari khazanah masa lampau. Gagasan yang digelorkan Muslim liberal juga bukan sesuatu yang benar-benar baru.

Sebagai upaya untuk merintis jalan tengah pemikiran Islam, yang pertama harus dilakukan adalah memosisikan pemikiran masa lalu sebagai khazanah yang tidak perlu disakralkan. Karena itu, penting dipertimbangkan pendapat Mohammed Arkoun yang menganjurkan agar tidak terjadi pensakralan pemikiran keagamaan (*taqdis al-afkar al-diniy*).<sup>33</sup> Dengan menempatkan produk pemikiran masa lalu sebagai khazanah, maka pasti akan menghilangkan "beban sejarah" sehingga kita dapat secara lebih kritis memberikan pandangan. Langkah kedua adalah menampilkan pemikiran Islam yang menggabungkan nilai modernitas dan tradisionalitas. Dalam bahasa pesantren terdapat ungkapan bijak; *al-muhafadhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah* (menjaga tradisi lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik). Dengan demikian pembaruan pemikiran keislaman memiliki kesinambungan sejarah dan tidak tercerabut dari akar tradisi, dan mempertimbangkan kearifan lokal (*local wisdom*). Melalui cara itulah kita akan dapat menampilkan wajah Islam moderat dalam konteks kemodernan dan keindonesiaan.

---

<sup>32</sup>Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid* (Bandung: Mizan, 2001), 76.

<sup>33</sup>Mohammed Arkoun, *The Unthought in Contemporary Islamic Thought* (London: The Institute of Ismaili Studies, 2002).



## Menanti Peran Muhammadiyah

Pada konteks kehidupan keagamaan yang diwarnai polarisasi orientasi ideologi yang masih terus memanas itulah Muhammadiyah penting hadir untuk memberikan solusi. Bukankah konteks kelahiran Muhammadiyah juga dilatarbelakangi kondisi umat yang terbelakang? Kehidupan berbangsa saat itu juga masih di bawah pengaruh kolonialisme. Diantara kisah populer yang menunjukkan kiprah KH Ahmad Dahlan adalah tatkala “Sang Pencerah” meluruskan arah kiblat Masjid Besar Kauman. Ikhtiar Dahlan kemudian memicu konflik dengan pejabat pemerintah, Kanjeng Penghulu Kamaludiningrat. Akibatnya, musala tempat pengajian Dahlan dan murid-muridnya dirobuhkan. Peristiwa perobohan musala sama sekali tidak menyurutkan dakwah Dahlan. Dakwah pencerahan beliau semakin meluas, tidak hanya berhenti pada usaha meluruskan arah kiblat shalat. Dahlan juga memelopori penggunaan bahasa Jawa dan Melayu untuk berkhotbah, pengelolaan haji, program mubaligh keliling, shalat ‘Idul Fitri dan ‘Idul Adha di lapangan, penafsiran al-Qur’an dengan bahasa lokal, dan pembentukan badan amil zakat. Pada saat itu pengelolaan zakat sangat bergantung pada elit ulama tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

Di bidang pendidikan, Dahlan juga mengupayakan terbentuknya sekolah modern dengan sistem klasikal. Kurikulum pendidikannya diperbarui dengan mengintegrasikan ilmu umum dan agama. Dengan sistem itu, Dahlan bermimpi untuk melahirkan lulusan yang ulama-intelektual atau intelektual-ulama. Dengan cara itu orientasi pendidikan umum dan pendidikan agama yang sering dipahami secara terpisah (*separated*) dapat dihindari. Pembaruan Dahlan ditujukan untuk mengimbangi pendidikan unggul yang dimiliki pemerintah kolonial Belanda dan umat Kristiani. Di bidang kesehatan, Dahlan telah meletakkan dasar-dasar pembangunan rumah sakit melalui badan yang bernama Penolong Kesejahteraan Oemum (PKO). Jika melihat kiprah “Sang Pencerah”, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa semua yang dilakukan Dahlan telah melampaui jamannya. Akibatnya, Dahlan harus menerima kenyataan dicemooh dan dituduh sebagai antek penjajah dan agen Kristen. Dahlan juga dituduh telah melecehkan agama karena berani melakukan praktek keagamaan yang masih asing. Semua tuduhan dan ancaman itu tidak menciutkan nyali Dahlan untuk berdakwah. Dakwah Dahlan memberantas takhayul, bid’ah, dan Churafat (TBC) semakin menggelora hingga ajal menjemputnya pada 1923.

Perspektif hirtoris perjuangan Dahlan penting dijadikan refleksi untuk memperluas horizon pembaruan (*tajdid*) Muhammadiyah. Menghadapi perdebatan dan persaingan dua mazhab pemikiran keagamaan di Indonesia yang secara diametral saling berhadapan Muhammadiyah penting menampilkan diri sebagai mediator. Muhammadiyah dapat



menjalankan fungsi *management of ideas* di antara berbagai mazhab pemikiran (*school of thoughts*). Pada konteks itulah moderatisme pemikiran keagamaan penting terus digelorakan. Untuk menjadi penengah, Muhammadiyah memiliki modal besar karena sejak awal berpandangan tidak bermazhab, baik dalam soal aqidah, fiqh, dan tasawuf. Pandangan keagamaan Muhammadiyah merujuk pada al-Qur'an dan al-Sunnah (*al-ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah*). Muhammadiyah pun menampilkan diri sebagai gerakan non-mazhab.<sup>34</sup> Dengan menjadi gerakan keagamaan yang non-bermazhab, Muhammadiyah tidak memiliki beban historis tatkala harus mengajak keolompok-kelompok keagamaan di Indonesia yang berpaham ekstrem untuk bergerak ke posisi tengah (*middle position*).

Ajakan bersikap moderat akan efektif jika ditempuh melalui dialog yang tulus, nirprasangka, dan tidak saling mengklaim kebenaran. Jika dialog ini dilakukan secara berkelanjutan, maka pada saatnya kita akan menyaksikan wajah Islam Indonesia yang moderat, inklusif, dan toleran terhadap berbagai keragaman. Dengan berfungsi sebagai mediator, berarti Muhammadiyah telah merekat jalinan hubungan pemikiran (*silatul fikr*) berbagai mazhab pemikiran keagamaan yang ada di negeri tercinta. Posisi tersebut penting dijalankan Muhammadiyah untuk merevitalisasi ideologi keagamaan umat sehingga berpikiran terbuka dan moderat. Muhammadiyah juga dapat mengajak berbagai kelompok keagamaan untuk menghormati dan merayakan perbedaan (*respect and celebrate to diversity*). Semoga persoalan moderasi pemikiran keagamaan menjadi perhatian aktivis Muhammadiyah. Agar mampu menjalankan tugas untuk memoderasi pemikiran keagamaan umat, maka Muhammadiyah harus menampilkan diri sebagai gerakan ilmu. Spirit intelektualisme itu akan memberi energi yang positif bagi Muhammadiyah untuk tetap menyalakan api ijtihad pada abad kedua.

---

<sup>34</sup>Abdul Munir Mulkan, *Masalah-Masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Roykhan, 2005), 26.